|  |  |
| --- | --- |
|  | **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BANYUMAS****Wiji Lestari, Denok Kurniasih, Tobirin**Universitas Jenderal Soedirman, IndonesiaEmail: wiji.lestari@unsoed.ac.id, denok.kurniasih@unsoed.ac.id, tobirin@unsoed.ac.id  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Abstrak**Stunting merupakan permasalahan gizi yang dihadapi oleh banyak masyarakat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia dengan angka prevalensi stunting yang cukup tinggi. Meningkatnya kasus stunting tidak terlepas dari persepsi yang terbentuk di masyarakat itu sendiri serta tingkat kesadaran akan potensi bahaya yang dimiliki stunting, baik dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam waktu selama 1 (satu) bulan pada September-Oktober 2023 dengan menggunakan metode teknik pengamatan (observasi lapangan), studi kepustakaan, dokumentasi, dan catatan lapangan, metode analisis menggunakan metode interpretatif dan penalaran induktif yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi stunting di masyarakat Kabupaten Banyumas memiliki keterkaitan dengan angka prevalensi stunting di daerah tersebut, masyarakat menilai edukasi dan pemberian informasi secara berkelanjutan dapat meningkatkan daya ingat dan kepahaman serta kepedulian masyarakat terhadap stunting, selain itu pembentukan regulasi yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi lapangan, juga mempercepat penurunan stunting di suatu daerah.**Kata kunci:** Stunting, Persepsi Masyarakat, Kebijakan***Abstract****Stunting is a nutritional problems faced by many countries in the world, including Indonesia, with a fairly high stunting prevelance rate. The increase in stunting cases can not be separated from the perception formed in society itself as well as the level of awareness of the potential dangers of stunting, both from the government as the policy maker, and other related parties. This research aims to determine the public’s perception of stunting reduction in Banyumas Regency, Central Java Province. This research is a qualitative research with a case approach and descriptive-analytical research specifiations. The data coollection was carried out in North Purwokerto District, Banyumas Regency, Central Java Province within 1 (one) month in September-October 2023 using field observation techniques, literature studies, documentation and field notes, and analyzed using interpretative method and inductive reasoning and presented in the form of narrative text. The results of the research show that the perception of stunting in the Banyumas Regency is related to the stunting prevelance rate in the area. The community assesses that continuous education and providing better information can raise the knowledge and understanding the concern of stunting, in addition of forming the right regulation with high accordance target and field conditions also accelerates the reduction of stunting in the area.****Keywords:*** *Stunting, Community Perception, Regulations* |

**PENDAHULUAN**

Indonesia dihadapkan pada ancaman kesehatan yang serius dalam prosesnya menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu permasalahan kesehatan tersebut yang memiliki dampak jangka panjang pada pertumbuhan anak yaitu mengenai stunting. Berdasarkan laporan *Asian Development Bank* menyebutkan pada tahun 2021 Indonesia mencapai 31,8% prevalensi stunting, lebih tinggi daripada rata-rata prevalensi stunting di negara ASEAN sebesar 27,41% (Salma & Ika, 2023). Sebaran stunting di Indonesia pada dasarnya terdapat di seluruh Provinsi, dengan proporsi prevalensi yang tidak merata (Dewi & Fuad, 2022). Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat ketidakcukupan gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan serta adanya dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Agustina, 2022). Secara sederhana, stunting dapat dipahami sebagai anak dengan gangguan pertumbuhan.

Stunting memiliki dampak yang serius dan berkepanjangan bagi anak-anak hingga usianya dewasa nanti. Anak-anak stunting memiliki risiko pertumbuhan fisik dan mental yang terganggu, kemampuan kognitif maupun psikososial yang tidak optimal ketika dewasa, dan memiliki kemungkinan mengalami obesitas serta penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes (Liem et al., 2019). Dampak serius yang ditimbulkan dari stunting pada anak-anak, dapat berpengaruh pada keberlangsungan bangsa Indonesia, tidak hanya soal kesehatan, melainkan soal kesejahteraan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, istilah stunting itu sendiri masih dianggap asing dan dinilai tidak memiliki dampak yang signifikan pada pasiennya menurut masyarakat luas.

Persepsi mencerminkan cara individu menjelaskan pengalaman yang diterima oleh inderanya, baik indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, sentuhan, dan rasa, dengan mendasari pada pola pengalaman sebelumnya yang sudah pernah tersimpan sehingga kemudian terbentuk pemahaman dan cara pandang individu terhadap lingkungan sekitarnya (Hapzah et al., 2023). Persepsi memiliki fungsi sebagai prediktor atau landasan dalam berperilaku, sehingga persepsi antarindividu terhadap satu masalah yang sama dapat dijelaskan secara berbeda-beda. Individu yang tidak memiliki persepsi atau pemahaman akan bertindak tanpa arah atau bahkan tidak bertindak sama sekali meskipun dihadapkan pada suatu kondisi yang membahayakan individu tersebut (Liem et al., 2019). Menurut (Komang et al., 2008), menyebutkan bahwa persepsi merupakan proses kognitif yang memungkinkan individu menginterpretasikan dan memahami sekitarnya, serta menerima informasi untuk membuat definisi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Sedangkan menurut Robins, menyebutkan bahwa persepsi merupakan proses dimana individu mengorganisasikanh dan menafsirkan kesannya untuk memberi arti tertentu pada lingkungannya. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan cara pandang individu terhadap suatu hal tertentu yang ia lihat atau rasa, dengan mendasari pada indera yang ada hingga menghasilkan suatu kesimpulan tertentu.

Persepsi yang salah yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia salah satunya dengan menganggap bahwa kerdil disebabkan karena faktor hereditas, menyebabkan permasalahan stunting sulit untuk ditangani sehingga membutuhkan usaha maksimal dari pemerintah dan berbagai sektor terkait (Noviaming et al., 2022). Keterlibatan pemerintah Indonesia secara terstruktur mulai dari pusat, daerah, dan desa, telah melakukan berbagai upaya terintegrasi untuk percepatan penurunan stunting melalui penyusunan berbagai jenis program yang melibatkan multisektor dan multipihak seperti intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung stunting dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung stunting yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan tersebut kemudian mengacu pada kewenangan desentralisasi yang dimiliki oleh daerah. Pada pelaksanaan sasaran utama intervensi penurunan stunting menggunakan pendekatan langsung pada sasaran prioritas lokasi stunting yakni di area Kabupaten/Kota dan/atau Desa tertentu dengan harapan hasil penurunan stunting yang maksimal, sehingga daerah diberi kebebasan inovasi pada program percepatan penurunan stunting dengan memperhatikan berbagai hal seperti data prevalensi stunting di daerah tersebut, luas wilayah, dan akses medan menuju fasilitas kesehatan di daerah terkait (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018).

Daerah menjadi lokasi fokus (lokus) untuk menerjemahkan kebijakan penanganan stunting di tingkat pusat ke dalam tindakan yang dapat diimplementasikan (Dewi & Fuad, 2022). Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menyelesaikan persoalan kesehatan, dalam hal ini yang berkaitan dengan stunting, tidak terlepas dari pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada peraturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara sederhana menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Zulkifli, 2021). Pada era otonomi daerah saat ini, telah ditekankan pemberian kewenangan yang luas kepada birokrasi pemerintahan daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak dan jaminan kehidupan dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya (Susanto & Kurniasih, 2017). Melalui pemberian otonomi daerah tersebut, maka akan ada kebijakan publik yang diberikan kepada daerah melalui desentralisasi. Kebijakan publik sendiri mengandung dua unsur, kebijakan dan publik. Kebijakan atau *policy* merupakan sebuah instrumen yang mengatur individu dan memiliki kaitan yang erat dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, serta evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap individu yang menjadi objek kebijakan (Musjarwanto, 2015). Sedangkan publik sendiri dalam hal ini adalah masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Menurut David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino, menyebutkan bahwa kebijakan publik hanya dapat dimiliki oleh pemegang otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara legal dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu pada masyarakatnya yang berkaitan dengan masalah sehari-hari yang ada (Jatmiko & Suharno, 2012). Kemudian, guna terlaksananya suatu kebijakan yang sesuai dengan program dan kebutuhan, maka dibutuhkan fungsi perencanaan dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut (Chasanah et al., 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perlu diketahui lebih lanjut hubungan persepsi masyarakat di Kabupaten Banyumas tentang upaya percepatan penurunan stunting yang mendasari pada kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dengan pelaksanaan kebijakan secara desentralisasi pada setiap pemerintah daerah melalui pendekatan langsung pada sasaran utama penurunan stunting yang terdekat dari pemerintah daerah setempat.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam waktu selama 1 (satu) bulan pada September-Oktober 2023 dengan menggunakan metode teknik pengamatan (observasi lapangan), studi kepustakaan, dokumentasi, dan catatan lapangan. Subjek penelitian merupakan individu yang dijadikan sebagai sumber informasi, seperti masyarakat yang memiliki anak stunting di Kecamatan Purwokerto Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai subjek pendukung, dan kader posyandu sebagai sumber informasi. Hasil dari pengumpulan data kemudian dianalisis menggunakan metode interpretatif dengan penalaran induktif sehingga data disajikan dalam bentuk teks naratif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Persepsi yang telah terbentuk di masyarakat yaitu ketidaktahuan dampak dari kurangnya gizi ibu hamil dan hubungannya dengan potensi bayi lahir stunting, akan mempersulit pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Masyarakat seringkali menganggap sederhana dan tidak penting persoalan stunting, meski pada kenyataannya stunting memiliki dampak yang signifikan pada keberlangsungan hidup bangsa. Ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya stunting akan mempengaruhi efektifitas yang tidak maksimal terhadap berbagai jenis kebijakan serta program yang telah dirancang oleh pemerintah mengenai percepatan penurunan stunting. Pada penelitian sebelumnya terhadap responden dari pelajar putri SMA di Kabupaten Gianyar, Bali, diketahui bahwa sebagian besar (86,6%) responden tidak mengetahui bahwa stunting merupakan masalah gizi yang dapat dialami sejak remaja, serta 50,4% responden memiliki persepsi negatif tentang stunting terlebih pada aspek yang berkaitan dengan pencegahan stunting (Natanael et al., 2022). Selain itu, masyarakat di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, cenderung memiliki persepsi bahwa stunting pada anak yaitu memiliki keterkaitan dengan keterlambatan bicara (*speech delay*), berat badan yang kurang, dan tidak memiliki kepercayaan diri akibat kebodohan, serta terdapat masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali tentang stunting terutama faktor penyebabnya (Khalid et al., 2022). Beberapa ibu di wilayah Puskesmas Tarus, Kabupaten Kupang, memiliki persepsi bahwa stunting berkaitan dengan penampilan fisik, seperti anak terlihat kecil, pertumbuhan lambat, badan pendek, kurus, lemah, dan kurang gizi, sehingga memberikan dampak lebih lanjut seperti mudah terkena penyakit, tidak memiliki semangat beraktivitas, cacat fisik, dan rendahnya daya tangkap anak (Noviaming et al., 2022). Persepsi yang terbentuk di masyarakat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kehidupan ekonomi, yang kemudian berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak (Tia et al., 2022).

Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk melakukan kajian atau evaluasi akan kesadaran masyarakat terhadap stunting guna mengetahui kebijakan publik yang tepat dalam membuat program percepatan penurunan stunting. Pemerintah terlebih dahulu harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya stunting, melalui penyuluhan, sosialisasi, seminar, kampanye, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan edukasi akan bahaya stunting. Masyarakat yang telah memahami dengan baik persoalan stunting, akan meningkatkan efektifitas dari kebijakan percepatan penurunan stunting yang telah dirancang oleh pemerintah, sehingga cita-cita untuk prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Percepatan penurunan stunting di Indonesia dilakukan secara serius dan terintegrasi oleh pemerintah, dimulai dengan pembentukan regulasi yang secara khusus mengenai stunting yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Melalui peraturan tersebut, pemerintah Indonesia secara khusus membuat program percepatan penurunan stunting, seperti intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung stunting dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung stunting. Komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan stunting, didukung oleh lima pilar pencegahan stunting. Adapun lima pilar pencegahan stunting tersebut yaitu: komitmen dan visi kepemimpinan; kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; ketahanan pangan dan gizi; serta pemantauan dan evaluasi. Lima pilar pencegahan stunting tersebut sejalan dengan konsep upaya pendekatan yang dibuat berdasarkan laporan UNICEF “*Southeast Asia Regional Report: on Maternal Nutrition and Complementary Feeding*”, yaitu: makanan, kesehatan, air bersih, sanitasi, higenitas (WASH), proteksi sosial, dan edukasi nutrisi ibu (United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2021). Program serta aksi yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk percepatan penurunan prevalensi stunting, hanya dapat bekerja secara optimal jika dilakukan dengan partisipasi dari multisektor dan multipihak, seperti program strategis yang dibentuk oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI). Program-program yang termasuk dalam RAN PASTI, seperti pemberian Tablet Penambah Darah (TPD) pada calon pengantin, pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi, pendamping ibu hamil yang Kurang Energi Kronik (KEK), edukasi tata laksana kesehatan dan gizi yang berkaitan dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI), dan lain-lain, yang kemudian disesuaikan kembali dengan karakteristik prevalensi stunting di setiap daerah di Indonesia.

 Program percepatan penurunan stunting tersebut kemudian dilimpahkan kepada setiap pemerintah daerah untuk diberlakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada daerah tersebut. Penyesuaian setiap daerah dalam program percepatan penurunan stunting di Indonesia, mengacu pada target indikator utama dalam intervensi penurunan stunting terintegrasi, yang didalamnya mencakup delapan hal. Delapan hal tersebut antara lain: prevalensi stunting pada anak baduta (bayi dua tahun) dan balita; bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR); kekurangan gizi pada balita; balita kurus; bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif; anemia pada ibu hamil dan remaja putri; kecacingan pada anak balita, dan diare pada baduta dan balita. Pelaksanaan target indikator utama dalam intervensi penurunan stunting menggunakan pendekatan langsung pada sasaran prioritas lokasi stunting yakni di area Kabupaten/Kota dan/atau desa tertentu dengan harapan hasil penurunan stunting yang maksimal (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018). Kebebasan inovasi progam percepatan penurunan stunting di setiap daerah mendasari pada data prevalensi stunting di daerah tersebut, keterlibatan multisektor dan multipihak di tingkat Kabupaten/Kota, luas wilayah, dan akses medan menuju fasilitas kesehatan di daerah terkait. Suatu program percepatan penurunan stunting yang dibuat oleh daerah tertentu, belum tentu akan cocok jika diterapkan di daerah lain yang tidak memiliki kesamaan karakteristik sasaran utama dari program percepatan stunting tersebut. Keterlibatan multisektor yang termasuk dalam proses kolaborasi pada penyusunan suatu kebijakan memiliki kendala tersendiri. Pada proses kolaborasi menuntut adanya kepercayaan kepada setiap pihak yang terlibat, perilaku yang baik, kemauan untuk berbagi materi, informasi, dan pengalaman pada hal tertentu tanpa melibatkan kepentingan pribadi maupun memberikan dampak negatif pada keberlangsungan program tersebut (Kurniasih et al., 2022).

Salah satu provinsi di Indonesia yang masuk dalam 12 besar prevalensi stunting tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Jawa Tengah tercatat 19 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori kuning atau prevalensi stunting sebesar 20%-30% (Puspita, 2022). Menurut hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGI), pada tahun 2021 ada sebanyak 20,9% anak berusia di bawah lima tahun di Jawa Tengah yang mengalami stunting atau dapat juga diartikan, setiap pertumbuhan 5 balita di Jawa Tengah, salah satunya mengalami stunting atau gangguan pertumbuhan (stunting.go.id, 2022). Kabupaten Banyumas merupakan salah satu lokus stunting dan termasuk dalam 100 Kabupaten/Kota prioritas penangan stunting se-Indonesia, dimana pada tahun 2021 kasusnya mencapai 21,6% (Puspita, 2022). Menurut Bupati Banyumas, ada 5.000 kasus stunting terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022, dengan jumlah 2.000 kasus terjadi pada anak-anak usia balita, sedangkan 3.000 kasus terjadi pada anak-anak usia di atas 5 tahun (kompasiana.com, 2022). Kabupaten Banyumas memiliki 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan 301 desa (Tobirin et al., 2019) dengan sebaran kasus stunting pada tahun 2022 di Kabupaten Banyumas tersebar di beberapa wilayah kecamatan, dengan perolehan paling banyak ditemukan di Kecamatan Cilongok, sebanyak 1.509 kasus yang terjadi pada 1.210 balita dan 299 baduta. Posisi terbanyak kedua ditempati oleh Kecamatan Sumbang sebanyak 1.004 kasus yang terjadi pada 784 balita dan 220 baduta. Sedangkan untuk Kecamatan Purwokerto Utara menjadi salah satu kecamatan yang memiliki sedikit kasus stunting yaitu sebanyak 171 kasus yang terdiri atas 134 balita dan 71 baduta, terakhir disusul oleh Kecamatan Purwokerto Timur sebanyak 158 kasus yang terdiri atas 123 balita dan 35 baduta. Kasus stunting yang terjadi di Kecamatan Purwokerto Utara paling banyak ditemui di Kelurahan Sumampir sebanyak 36 balita *stunted* dan Kelurahan Purwanegara dengan 10 baduta *stunted*. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingginya prevalensi stunting di beberapa daerah di Kabupaten Banyumas, seperti keadaan ekonomi, lingkungan tempat anak tumbuh, pola asuh orang tua, dan pola makan. Menurut Kepala Bappedalitbang Banyumas, menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Organisasi Pemerintah Daerah (ODP) dalam percepatan penurunan stunting adalah kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait Keluarga Berencana (KB), rendahnya pemberian ASI eksklusif, imunisasi pada balita yang tidak maksimal, tingginya pernikahan dini, kesulitan akses sanitasi, dan rumah tangga yang tidak dapat mengolah limbah (Kusumawardhani & Fahrudin, 2022). Faktor-faktor tersebut juga menjadi hal yang membedakan fenomena stunting di suatu kecamatan berbeda dengan di kecamatan lainnya.

Fenomena stunting khususnya di Kecamatan Purwokerto Utara yang menunjukan prevalensi rendah tidak terlepas dari persepsi stunting yang terbentuk di masyarakat sekitar Kecamatan Purwokerto Utara yang sudah memiliki kesadaran baik tentang stunting. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Purwokerto Utara yang bekerja sama dengan pihak lain seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan DPPKBP3A melalui PLKB Kecamatan dalam upaya prevalensi stunting seperti Rembuk Stunting, Mini Lokakarya, dan Timbang Serentak, yang secara langsung melibatkan masyarakat, baik keluarga terdampak stunting maupun bentuk edukasi bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kepedulian dan ilmu pengetahuan mengenai upaya pencegahan stunting di Kecamatan Purwokerto Utara. Pada program Rembuk Stunting yang dilakukan di Kabupaten Banyumas telah dilakukan oleh OPD terkait seperti intervensi terhadap gizi anak, rehab rumah, penyediaain air bersih, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk penurunan stunting secara maksimal yang dilakukan bersinergi dengan pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat (Sumarwoto & Wibowo, 2023). Menurut Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastio, menyebutkan tujuan dari program Rembuk Stunting untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas hasil dari analisis situasi dan rancangan kinerja dari lintas sektor dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat dalam penurunan kasus stunting (Masyrafina & Assidiq, 2023). Komunikasi dan koordinasi dilakukan lebih lanjut melalui media Mini Lokakarya yang pesertanya adalah pihak Puskesmas, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan (Korwil Dindik), Lurah/Kepala Desa, Koordinator Penyuluh KB, serta Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Puspita, 2022). Selain program percepatan stunting untuk wilayah Kecamatan Purwokerto Utara tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Banyumas juga melaksanakan kerja sama dengan pihak swasta seperti Tanoto Foundation dalam pembentukan Rumah Anak Siapkan Generasi Anak Berprestasi (SIGAP) yang diresmikan di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok (Shofihara & Gewati, 2023), sebagai salah satu kecamatan dengan prevalensi stunting tinggi di Kabupaten Banyumas. Upaya untuk mempercepat penurunan stunting juga dilakukan oleh Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas melalui Pimpinan Daerah Aisyiyah dan Lazismu Kabupaten Banyumas dengan melaksanakan kegiatan Program Penanganan dan Pencegahan Stunting yang berlangsung di Kecamatan Kalibagor dan dihadiri oleh 73 ibu hamil (Doddy, 2023).

Upaya tersebut di atas yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari landasan formal yaitu melalui Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 050/184/Tahun 2022 tentang Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, dimana merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang didalamnya dipimpin langsung oleh Bupati Banyumas dengan melibatkan Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resort Komandan Distrik Militer 0711 Banyumas, Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, dan Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas. Melalui SK tersebut, kemudian dibuat pula Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang terdiri atas perwakilan beberapa dinas serta lembaga non-pemerintah yang terkait. Kemudian dibentuk pula Forum Jaga Stunting Banyumas (Jatingmas) yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinsospermades, Bappedalitbang, DPPKBP3A, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Permukiman, yang merupakan media penguatan tugas dari kader lembaga kemasyarakatan desa yang terlibat di bidang penanggulangan stunting. Selanjutnya, pada tingkat Desa/Kelurahan, kemudian dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri atas Bidan, Kader PKK, dan Kader KB, yang memiliki tugas pendampingan langsung keluarga berisiko stunting, penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-59 bulan (Puspita, 2022). Melalui berbagai landasan formal yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, tidak terlepas dari pemahaman yang baik terkait lingkungan kebijakan sebagai sumber input perumusan kebijakan sehingga dapat dilaksanakan secara komprehensif (Rosyadi & Tobirin, 2010). Kehadiran pihak lembaga di luar pemerintah daerah juga dapat membantu pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penyusunan kebijakan terkait stunting (Lestari et al., 2022).

Kerja sama yang terbentuk dari pemerintah, multisektor, dan multipihak akan kesadaran percepatan penurunan stunting, telah membantu memperbaiki persepsi dan pandangan masyarakat terkait stunting, bahwa pemberian asupan gizi yang baik pada anak merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kecerdasan anak penerus bangsa dan menjadi upaya preventif stunting. Selain itu, pendekatan edukasi keluarga juga menjadi salah satu upaya dalam percepatan penurunan stunting, melalui perbaikan pola makan, pola hidup bersih dan sehat, serta pola asuh. Edukasi dan penyebaran informasi mengenai stunting yang dilakukan secara terus menerus baik oleh pemerintah maupun swasta, membantu sasaran dari prevalensi stunting memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, serta keluarga secara keseluruhan.

**KESIMPULAN**

Persepsi masyarakat mengenai stunting akan berpengaruh pada efektivitas kebijakan percepatan penurunan stunting yang telah dirancang oleh pemerintah. Persepsi masyarakat berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya stunting, partisipasi masyarakat, pemantauan dan evaluasi, serta dukungan untuk kebijakan. Masyarakat yang telah mengetahui dengan baik akan bahaya stunting dapat mendukung dan menjadi partisipan aktif dalam kebijakan percepatan penurunan stunting yang telah dibentuk oleh pemerintah saat ini maupun yang akan datang dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya dalam percepatan penurunan stunting, seperti Rembuk Stunting, Mini Lokakarya, dan Timbang Serentak, serta program lain yang pelaksanaannya melibatkan multisektor dan multipihak dengan tujuan menekan angka prevalensi stunting serta memperbaiki persepsi mengenai stunting melalui penyebarluasan informasi dan pemberian edukasi secara berkelanjutan dari pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dengan sasaran penurunan stunting, seperti remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga, serta masyarakat umum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustina, N. (2022). *Apa itu Stunting*. https://yankes.kemkes.go.id/view\_artikel/1516/apa-itu-stunting

Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, *3*(2), 12–32. https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921

Dewi, S. K., & Fuad, A. (2022). Strategi Segmenting, Targeting, dan Positioning dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Banten. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, *3*(2), 398–406. https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.5914

Doddy. (2023, September). *Cegah Stunting, Lazismu dan Aisyiyah Edukasi Ibu Hamil di Kabupaten Banyumas*. https://lazismu.org/view/cegah-stunting-lazismu-dan-aisyiyah-edukasi-ibu-hamil-di-kabupaten-banyumas

Hapzah, Asmuni, & Nurbaya. (2023). Stunting itu Bukan Hanya Pendek: Studi Kualitatif Persepsi Ibu tentang Stunting dan Faktor Penyebabnya. *The Indonesian Journal of Public Health*, *18*(3), 28–35.

Jatmiko, A. P., & Suharno. (2012). *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya Sebagai Kearifan Lokal*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Kementerian PPN/ Bappenas. (2018). Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota. *Rencana Aksi Nasional Dalam Rangka Penurunan Stunting: Rembuk Stunting*, *November*, 1–51. https://www.bappenas.go.id

Khalid, S. H., Patimah, S., & Asrina, A. (2022). Persepsi Masyarakat mengenai Penyebab dan Dampak Stunting di Kabupaten Majene Sulawesi Barat Tahun 2020. *Journal of Muslim Community Health*, *3*(Vol. 3 No. 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER (JMCH)), 80–94. https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch/article/view/1177/1366

Komang, A., Mujiati, N. W., & Sriathi, A. A. A. (2008). *Perilaku Keorganisasian*. Graha Ilmu.

kompasiana.com. (2022). *“Cegah Stunting Itu Penting (CETING)” Bersama Masyarakat Desa Selandaka Kabupaten Banyumas*. https://www.kompasiana.com/ridharrachman5425/6312d64ec3bdbf6ee5264d02/c

Kurniasih, D., Rosyadi, S., Sabiq, A., & Ahmad, A. A. (2022). Collaboration Challenges in Helping the Rural Creative Tourism Sector to Recover During the COVID-19 Pandemic. *KnE Social Sciences*, *2022*, 412–422. https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10954

Kusumawardhani, A., & Fahrudin, A. (2022). *Turunkan Prevalensi Stunting pada 2024, Ini Langkah Banyumas dan Wonosobo*. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/turunkan-prevalensi-stunting-pada-2024-ini-langkah-banyumas-dan-wonosobo/

Lestari, T. L., Rosyadi, S., & Tobirin, T. (2022). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Publik. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, *3*(1), 363–375. https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.3938

Liem, S., Panggabean, H., & Farady, R. M. (2019). Persepsi Sosial Tentang Stunting Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, *18*(1), 37–47. https://doi.org/10.22435/jek.18.1.167.37-47

Masyrafina, I., & Assidiq, Y. (2023). *Soal Penanganan Stunting, Wabup Banyumas: Semua Elemen Harus Terlibat*. https://rejogja.republika.co.id/berita/rv4ba1399/soal-penanganan-stunting-wabup-banyumas-semua-elemen-harus-terlibat

Musjarwanto, R. S. (2015). *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Upaya Mewujudkan Good Governance: Studi Kasus Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Natanael, S., Putri, N. K. A., & Tresna Adhi, K. (2022). Persepsi Tentang Stunting Pada Remaja Putri Di Kabupaten Gianyar Bali. *Penelitian Gizi Dan Makanan (The Journal of Nutrition and Food Research)*, *45*(1), 1–10. https://doi.org/10.22435/pgm.v45i1.5900

Noviaming, S., Takaeb, A. E. L., & Ndun, H. J. N. (2022). Persepsi Ibu Balita Tentang Stunting Di Wilayah Puskesmas Tarus Kabupaten Kupang. *Media Kesehatan Masyarakat*, *4*(1), 44–54. https://ejurnal.undana.ac.id/MKM

Puspita, D. R. (2022). *Analisis Komunikasi pada Program Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Banyumas*. 1–8.

Rosyadi, S., & Tobirin. (2010). Perumusan Kebijakan Publik dalam Menggali Akar Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *10*(2), 114–125.

Salma, & Ika. (2023, February). *UGM and Central Java Accelerate Response to Childhood Stunting and Malnutrition*. https://ugm.ac.id/en/news/23442-ugm-and-central-java-accelerate-response-to-childhood-stunting-and-malnutrition/.

Shofihara, I. J., & Gewati, M. (2023). *Percepat Penurunan Stunting, Pemkab Banyumas Gandeng Tanoto Foundation Hadirkan Rumah Anak Sigap*. https://regional.kompas.com/read/2023/08/11/15281031/percepat-penurunan-stunting-pemkab-banyumas-gandeng-tanoto-foundation?page=all

stunting.go.id. (2022). *Sudah Turun Tajam, Gus Yasin Ungkap Mengapa Stunting Masih Tinggi di Jateng*. https://stunting.go.id/sudah-turun-tajam-gus-yasin-ungkap-mengapa-stunting-masih-tinggi-di-jateng/

Sumarwoto, & Wibowo, T. I. (2023). *Prevalensi stunting di Banyumas turun 5 persen pada 2022*. https://jateng.antaranews.com/berita/483741/prevalensi-stunting-di-banyumas-turun-5-persen-pada-2022

Susanto, A. E., & Kurniasih, D. (2017). KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN CILACAP ( Pengaruh Motivasi Kerja , Komitmen Pegawai dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap ). *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, *01*(02), 169–181.

Tia, Y. W., Ita, E., & Ngura, E. T. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Stunting Pada Anak Usia Dini Di Kabupaten Ngada. *Jurnal Citra Pendidikan*, *2*(1), 75–83. https://doi.org/10.38048/jcp.v2i1.347

Tobirin, Anwaruddin, & Nuraini, H. (2019). Kebijakan Pro Gender Dalam Percepatan Pembangunan Desa Yang Berpihak Pada Perempuan. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers*.

United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2021). Southeast Asia Regional Report on Maternal Nutrition and Complementary Feeding. *Who*, *October*, 83.

Zulkifli, A. S. (2021). *Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau dalam Mengatasi Gizi Buruk di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Riau.

|  |
| --- |
| **This work is licensed under a** [**Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |